

RINGKASAN

GHAIDA NABILAH, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Peranan Prinsip Kemandirian Dalam Menjalankan Profesi Notaris, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Abdul Aziz Ns, S.H., M.M., M.H, anggota : Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta, akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan atau adanya gugatan dari pihak lain, dalam melaksanakan aktifitasnya seorang notaris harus berpedoman kepada Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kemandirian dalam menjalankan jabatan Notaris dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran prinsip kemandirian oleh Notaris. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sedangkan sumber bahan hukum adalah studi kepustakaan (library research). Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pengumpulan data studi kepustakaan.

Hasil peneltian wujud dari kemandirian Notaris itu tercermin dalam menjalankan tugas dan jabatannya, pekerjaan Notaris tersebut bekerja secara benar dan professional sesuai dengan perintah Undang-Undang dan hasil penelitian kedua Akibat hukum apabila Notaris tidak mandiri dalam melaksanakan kewajibannya maka akan berdampak terhadap akta yang dibuatnya.

Kata Kunci : Prinsip Kemandirian, Sanksi, Notaris.

SUMMARY

GHAIDA NABILAH, Magister of Notary, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, The Role Of Regional Honorary Boards For The Making Of Notary Deed In Cirebon District, Advisory Commission, Chairperson : Dr. Abdul Aziz Ns, S.H., M.M., M.H, Member : Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Notary is a public official who can be used by the Government based on a Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to assist the public in terms of making a written agreement made before a Notary called deed, the deed can be used as strong evidence if a dispute occurs or there is a claims from other parties, in carrying out their activities a notary must be guided by Law number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary Public.

This study aims to analyze the application of the principle of independence in running a Notary and the legal consequences if there is an independent violation by a Notary. The research conducted is normative legal research with an approach to the application of laws and a concept approach. The technique of collecting legal materials is done through literature study. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Meanwhile, the source of legal materials is library research. The data collection technique used in writing this thesis is library study data collection.

Based on the results of the research, the form of the Notary is written in carrying out his duties and positions, the work of the Notary is working properly and professionally in accordance with the orders of the Law and the results of the second research. As a result of the legal environment, the Notary is not independent in carrying out his obligations, it has an impact on the deed he makes.

Keywords: Principle of Independence, Sanctions, Notary.